

PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU 2019 BAWASLU KOTA SALATIGA

TAHAPAN PENCALONAN

Dalam rangka persiapan pengawasan, Bawaslu melakukan pemetaan terlebih dahulu untuk memastikan fokus pengawasan yang akan menjadi titik pengawasan dan metode yang akan dilakukan. Secara teknis, fokus dan metode pengawasan telah diatur oleh Peraturan Bawaslu Nomor .. Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum. Akan tetapi berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan sebelumnya, fokus pengawasan Pengawas Pemilu dipertajam, sehingga fokus pengawasannya meliputi:

1. Persyaratan pencalonan calon Peserta Pemilu 2019;
2. Tata cara penentuan dan pengusulan peserta pemilu 2019;
3. Tata cara pendaftaran bakal calon peserta pemilu 2019;
4. Tata cara verifikasi persyaratan bakal calon peserta pemilu 2019;
5. Penetapan dan pengumuman peserta pemilu 2019; dan
6. Penggantian calon peserta pemilu 2019 yang berhalangan tetap.

Terhadap fokus pengawasan tersebut, Bawaslu melakukan pengawasan dengan menggunakan 2 metode, yaitu:

- (1) Metode observasi langsung terhadap proses pendaftaran bakal calon peserta pemilu 2019 dan manajemen verifikasi persyaratan;
- (2) Metode audit dokumen persyaratan bakal calon untuk menguji kebenaran dan validitas.

Adapun hasil pengawasan tahapan pencalonan ini adalah sbb:

KPU Kota Salatiga menetapkan partai politik peserta pemilu tahun 2019 yang dinyatakan lolos setelah melalui proses verifikasi sejumlah 12 (dua belas) yaitu

PKB (Partai Kebangkitan Bangsa),

PARTAI GERINDRA (Partai Gerakan Indonesia Raya),

PDI P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan),

PARTAI GOLKAR (Golongan Karya),

NASDEM (Nasional Demokrat),

PARTAI GARUDA (Gerakan Perubahan Indonesia)

PARTAI BERKARYA (Beringin Karya),

PKS (Partai Keadilan Sejahtera),

PARTAI PERINDO (Persatuan Indonesia),

PPP (Partai Persatuan Pembangunan),

PSI (Partai Solidaritas Indonesia),

PAN (Partai Amanat Nasional),

PARTAI DEMOKRAT

Jumlah calon anggota legislative yang mendaftar di KPU : 276 (laki-laki 168, perempuan 108)

Jumlah calon anggota legislative yang ditetapkan KPU : 251 (laki-laki 147, Perempuan 104)

TAHAPAN MUTARLIH

Tahapan Pemutahiran Data dan Daftar pemilih pada Pemilu 2019 ini menjadi salah satu tahapan yang mendapat perhatian besar dari Bawaslu , hal ini mengingat masalah daftar pemilih adalah masalah laten yang selalu muncul pada setiap penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu menyakini bahwa pada Pemilu 2019 , tahapan pendaftaran pemilih ini meskipun isunya kalah ramai dibanding isu pencalonan dan kampanye, tetap memiliki potensi kerawanan yang masih sangat tinggi.

Berdasarkan tahapan, program dan jadwal Pemilu Presiden dan Wakil Presidensebagaimana peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014, tahapan pelaksanaan daftar pemilih Pemilu tahun 2019 dimulai dari tahapan penyusunan dan penetapan daftar pemilih sementara (DPS) yang datanya berasal dari Daftar pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018) di tambah dengan pemilih usia 17 tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara, atau pemilih baru yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya dilakukan proses pemutakhiran data pemilih, kemudian pengumuman daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran (DPSHP) untuk menerima tanggapan dan masukan masyarakat sebelum akhirnya ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT)

adapun rekapitulasi hasil pengawasan tahapan mutarlih pemilu 2019 adalah :

1. Jumlah pemilih yang ditetapkan pada Pleno DPS di Kota Salatiga:

Jumlah Pemilih Laki-laki	: 64.434 pemilih
Jumlah Pemilih Perempuan	: 68.444 pemilih
Total Pemilih di DPS	: 132.878 pemilih

2. Jumlah pemilih yang ditetapkan pada Pleno DPTHP1 di Kota salatiga :

Jumlah Pemilih Laki-laki	: 64.494 pemilih
Jumlah Pemilih Perempuan	: 68.525 pemilih
Total Pemilih di DPTHP1	: 133.019 pemilih

3. Jumlah pemilih yang ditetapkan pada Pleno DPTHP2 di Kota salatigaa:

Jumlah Pemilih Laki-laki	: 65.607 pemilih
Jumlah Pemilih Perempuan	: 69.879 pemilih
Total Pemilih di DPTHP2	: 135.486 pemilih

dan disempurnakan kembali dengan DPTHP2 Penyempurnaan dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah Pemilih Laki-laki	: 65.482 pemilih
Jumlah Pemilih Perempuan	: 69.667 pemilih
Total Pemilih di DPTHP2p	: 135.149 pemilih

4. Jumlah pemilih yang TMS (Ganda, invalid, TNI, Polri, Pindah Domisili, Dibawah umur, Meninggal, Hilang ingatan, bukan penduduk, dicabut hak pilihnya):

Pemilih tidak memenuhi syarat yang terdapat pada penetapan DPTHP2 Penyempurnaan ada sejumlah **683** orang. TMS yang cukup banyak ini dikarenakan adanya pemilih yang berada di luar negeri yang pada hari Pemilihan (17 April 2019) tidak kembali/pulang ke Salatiga maka dari itu

KPU memutuskan untuk mencoret data pemilih dari DPTHP2 Penyempurnaan. Sisa data dari pemilih TMS meninggal dunia.

5. Jumlah pemilih disabilitas di Kota Salatiga:

Jumlah Pemilih Disabilitas Laki-laki : 158 pemilih

Jumlah Pemilih Disabilitas Perempuan : 157 pemilih

Total Pemilih Disabilitas di **DPTHP2p** : **315** pemilih

Dengan rincian :

Pemilih dengan disabilitas Tuna Daksa : 90 pemilih

Pemilih dengan disabilitas Tuna Netra : 53 pemilih

Pemilih dengan disabilitas Tuna Rungu : 54 pemilih

Pemilih dengan disabilitas Tuna Grahita : 65 pemilih

Pemilih dengan disabilitas lainnya : 53 pemilih

6. Jumlah Pemilih Baru di Kota Salatiga :

Jumlah Pemilih Baru laki-laki : 174 pemilih

Jumlah Pemilih Baru Perempuan : 172 pemilih

Total Pemilih Baru di **DPTHP2p** : **346** pemilih

7. Jumlah Pemilih Pemula yang terdaftar di DPTHP2p Kota Salatiga sejumlah 89 pemilih.

8. Jumlah rekomendasi terakhir yang diserahkan ke KPU Salatiga pada tahapan pemeliharaan DPTHP2:

Bawaslu Kota Salatiga Merekomendasi sejumlah **42 data**, dengan rincian sbb :

Pemilih meninggal dunia : 39 orang

Pemilih pindah domisili : 1 orang

Pemilih baru : 2 orang

Disamping proses tahapan tersebut, ada proses lagi yang terkait dengan tahapan pendaftaran pemilih ini adalah, pendaftaran pemilih yang masuk kategori pemilih tambahan (DPTb) atau yang disebut pemilih yang pindah TPS dengan syarat menggunakan formulir A5-PPWP, yang penyusunannya dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara serta pendaftaran pemilih yang masuk kategori DPK (daftar pemilih khusus) pada hari pemungutan suara

TAHAPAN KAMPANYE

Pengawasan tahapan kampanye secara garis besar bertujuan untuk memastikan Pertama, terselenggaranya kampanye Pemilu secara aman, tertib, damai, berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab; Kedua, adanya perlakuan yang sama oleh penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan pihak terkait lainnya terhadap masing-masing Peserta Pemilu, baik dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam

mempersiapkan dan menyelenggarakan aktivitas kampanye; Ketiga, terselenggaranya pendidikan politik secara baik lewat penyampaian visi, misi, dan program dari masing-masing peserta pemilu; dan Keempat, menjamin terselenggaranya kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa metode kampanye sebagaimana diatur dalam PKPU kampanye diantaranya pemasangan APK, penyebaran Bahan Kampanye, Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Kampanye di medsos, Kampanye rapat umum, kampanye di media massa serta kampanye dalam bentuk lain yang bisa berupa kegiatan sosial, budaya, olahraga, perlombaan, bazar.

Salah satu obyek pengawasan tahapan kampanye adalah pelaksana, peserta dan petugas kampanye. Pengawas Pemilu memastikan bahwa orang-orang yang terlibat sebagai pelaksana dan tim kampanye bukanlah orang-orang yang masuk dalam pihak-pihak yang dilarang. Oleh karena itu salinan daftar pelaksana dan tim kampanye menjadi penting di miliki oleh Pengawas Pemilu, namun faktanya beberapa peserta masih belum secara menyeluruh mendaftarkan pihak-pihak yang berwenang melaksanakan kegiatan kampanye tersebut ke KPU. Aspek penting lainnya dari identifikasi pelaksana dan tim kampanye adalah untuk mengetahui ada tidaknya pejabat yang merupakan pihak yang dilarang berkampanye terdaftar. Hal ini penting karena Presiden dan Wakil Presiden serta pejabat Negara ketika menjadi pelaksana kampanye maupun tim kampanye harus mempunyai ijin cuti. Terkait ijin cuti pun, Pengawas Pemilu kesulitan untuk mendapatkannya dan harus bersikap proaktif dengan mengirimkan surat.

Adapun rekapitulasi kegiatan pengawasan kampanye peserta pemilu 2019 di kota salatiga adalah:

JUMLAH KEGIATAN KAMPANYE

NO	NAMA PARPOL	JUMLAH KAMPANYE				
		PT	TM	RU	GIAT LAIN	JUMLAH
1	PKB	0	4	0	0	4
2	GERINDRA	4	0	0	1	5
3	PDI PERJUANGAN	12	12	0	1	25
4	GOLKAR	2	3	0	5	10
5	NASDEM	1	2	0	0	3
6	GARUDA	0	0	0	0	0
7	BERKARYA	4	9	0	0	13
8	PKS	1	7	0	1	9
9	PERINDO	0	5	0	0	5
10	PPP	0	1	0	0	1
11	PSI	0	10	0	0	10
12	PAN	0	0	0	0	0
13	DEMOKRAT	9	2	0	0	11
1	PASLON 01	1	0	1	2	4
2	PASLON 02	1	3	1	0	5
JUMLAH TOTAL		35	58	2	10	105

Keterangan:

PT = Pertemuan Terbatas

TM= Tatap Muka

RU= Rapat Umum

APK MELANGGAR

NO	NAMA PARPOL	JENIS APK MELANGGAR						JUMLAH
		BALIHO	BANNER	SPANDUK	POSTER	STIKER	LAIN-LAIN	
1	PKB	112	799	60	127	21	34	1.153
2	GERINDRA	53	226	13	0	0	28	320
3	PDI P	163	2.631	112	977	347	104	4.334
4	GOLKAR	32	184	10	107	213	143	689
5	NASDEM	50	334	115	59	0	0	558
6	GARUDA	0	20	0	0	0	0	20
7	BERKARYA	0	51	0	0	0	0	51
8	PKS	112	799	60	127	21	34	1.153
9	PERINDO	30	321	42	47	4	20	464
10	PPP	16	120	7	12	0	0	155
11	PSI	6	59	37	0	0	0	102
12	PAN	32	128	9	58	0	0	227
13	DEMOKRAT	64	454	7	152	0	27	704
1	PASLON 01	14	132	5	0	0	0	151
2	PASLON 02	3	4	20	0	18	0	45
JUMLAH TOTAL		687	6.262	497	1.666	624	390	10.126

TAHAPAN DANA KAMPANYE

Isu pendanaan selalu menjadi hal yang sensitif dan mengundang perhatian (interest) publik yang besar. Hal ini disebabkan oleh dekatnya isu pendanaan dengan korupsi. Secara konseptual, isu dana kampanye memang sangat erat kaitannya dengan korupsi atau korupsi Pemilu. Hal ini tidak hanya merusak demokrasi tetapi juga menghancurkan nilai dan etika politik di tingkat masyarakat terlebih lagi di tingkat elit politik.

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap dokumen laporan sumbangan dana kampanye dari sisi ketepatan waktu pelaporan dan keterpenuhan prosedur serta kesuaian penerimaan laporan sumbangan dana kampanye. Proses pemantauan ini bermaksud untuk memastikan terjadinya pelaporan penggunaan dana kampanye selama proses kegiatan kampanye Pemilu yang bersifat legal, akuntabel dan transparan. Bagi calon kandidat presiden dan wapres harus mampu untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye mereka ke publik.

Pelaksanaan pengawasan laporan dana kampanye ini mencakup, LADK, Penyerahan LPSDK, Penyerahan LPPDK, Penyerahan hasil audit KPU.

adapaun hasil pengawasan tahapan dana kampanye adalah :

NO	PARTAI POLITIK	JENIS (RP)			TOTAL
		UANG	BARANG	JASA	
1	PKB	Rp -	Rp 9.500.000	Rp 13.937.245	Rp 23.437.245
2	GERINDRA	Rp -	Rp -	Rp 165.848.650,00	Rp 165.848.650
3	PDIP	Rp -	Rp -	Rp 401.020.865	Rp 401.020.865
4	GOLKAR	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	NASDEM	Rp 8.000.000	Rp 2.475.000	Rp 58.565.600	Rp 69.040.600
6	GARUDA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7	BERKARYA	Rp -	Rp -	Rp 7.498.700	Rp 7.498.700
8	PKS	Rp 25.000.000	Rp 76.346.700	Rp -	Rp 101.346.700
9	PERINDO	Rp 1.800.000	Rp 135.000	Rp 207.254.570	Rp 209.189.570

10	PPP	Rp -	Rp -	Rp 9.307.600	Rp 9.307.600
11	PSI	Rp -	Rp -	Rp 18.330.000	Rp 18.330.000
12	PAN	Rp 9.300.000	Rp -	Rp -	Rp 9.300.000
13	HANURA				Rp -
14	DEMOKRAT	Rp 4.575.000	Rp -	Rp 62.085.380	Rp 66.660.380
19	PBB				Rp -
20	PKPI				Rp -
JUMLAH		Rp 48.675.000	Rp 88.456.700	Rp 944.028.610	Rp 1.081.160.310

TAHAPAN KELENGKAPAN LOGISTIK

Berdasarkan hasil evaluasi pengawasan produksi dan distribusi logistik Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2019, terdapat banyak hal kecarut-marutan yang terjadi dalam pelaksanaan non tahapan Pemilu ini. Mulai dari tertutupnya proses produksi logistik Pemilu, logistik Pemilu yang kurang, rusak dan bahkan tidak sampai ke tujuan adalah variable-variabel yang menunjukkan kecarut-marutan tersebut. Namun demikian, tentu saja buruknya kualitas manajemen KPU ini sedikit banyak menjadi catatan kritis Pengawas Pemilu yang mau tidak mau menjadi bagian dari buruknya manajemen produksi dan distribusi logistik Pemilu.

Berikut hasil pengawasan kelengkapan logistic pemilu 2019

SURAT SUARA

No	SURAT SUARA	JUMLAH		KEKURANGAN			
		KEBUTUHAN (DPT +2%PER TPS)	DITERIMA DARI REKAMAN KPU RI	KURANG KEBUTUHAN AWAL*	KARENA SELISIH HITUNG**	TIDAK LOLOS SORTIR***	JUMLAH TOTAL KEKURANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PPWP	138.153	137.181	972	0	79	1.051
2	DPD	138.153	137.852	301	0	335	636
3	DPR RI	138.153	137.772	381	0	1.058	1.439
4	DPRD Prov	138.153	137.935	218	0	680	898
5	DPRD Kab/Kota	138.153	137.659	494	0	1.193	1.687
	➤ Dapil 1	31.792	31.664	128	0	258	386
	➤ Dapil 2	39.487	39.240	247	0	496	743
	➤ Dapil 3	32.815	32.770	45	0	86	131
	➤ Dapil 4	34.059	33.985	74	0	353	427
	JUMLAH TOTAL	690.765	688.399	2.366	0	3.345	5.711

SURAT SUARA TAMBAHAN

TAMBAHAN	JUMLAH KEKURANGAN
301	750
257	379
301	1.138
301	597
300	1.387
68	318
92	651
65	66
75	352
JUMLAH	5.638

KOTAK BILIK SEGEL TINTA FORM

No	JENIS LOGISTIK	JUMLAH TOTAL KEBUTUHAN*	TERSEDIA/ DITERIMA DARI REKANAN KPU	KEKURANGAN
1	Kotak suara	3.114	3.114	0
2	Bilik	1.228	1.228	0
3	Segel	42.980	42.980	0
4	Tinta	1.228	1.228	0
5	Set Formulir Model C	614	614	0

TAHAPAN DISTRIBUSI LOGISTIK

Dalam pelaksanaan pengawasan distribusi, Bawaslu RI telah memerintahkan Bawaslu Provinsi untuk melakukan supervisi di Kabupaten/Kota masing-masing diwilayahnya dalam pelaksanaan sortir surat suara di KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, Bawaslu RI lalu memerintahkan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan melekat pelaksanaan sortir surat suara tersebut.

Beberapa permasalahan dalam pengawasan tahapan distribusi logistik

- Jadwal tak menentu
- Kekurangan Logistik
- Kurangnya fasilitas Keamanan
- SDM Baru ditengah tahapan

TAHAPAN PUNGUT HITUNG

No	Nama Kecamatan	Jumlah kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah KPPS	Jumlah PTPS
1	Sidomukti	4	138	966	138
2	Sidorejo	6	181	1267	181
3	Tingkir	7	138	966	138
4	Argomulyo	6	157	1099	157
		23	614	4298	614

TAHAPAN REKAPITULASI**KEC.SIDOMUKTI**

NO	NAMA PARPOL	Perolehan	PEMBAGIAN			Kursi ke	
			1	3	5		
1	PKB	2883	2883	961	577	4	FATONI
2	GERINDRA	2428	2428	809.3	486	6	AGUS P
3	PDIP	12220	12220	4073	2444	1,2,5	TEDDY,BAGAS,FARDILA
4	GOLKAR	402	402	134	80.4		
5	NASDEM	231	231	77	46.2		
6	GARUDA	86	86	28.67	17.2		
7	BERKARYA	55	55	18.63	11		
8	PKS	3323	3323	1108	665	3	MAMAN
9	PERINDO	124	124	41.33	24.8		
10	PPP	2311	2311	770.3	462		
11	PSI	800	800	266.7	160		
12	PAN	912	912	304	182		
13	HANURA	8	8	2.667	1.6		
14	DEMOKRAT	1162	1162	387.3	232		
15	PBB	13	13	4.33	2.6		
16	PKPI	7	7	2.2	1.4		

KECAMATAN SIDOREJO

NO	NAMA PARPOL	Perolehan	PEMBAGIAN			Kursi ke	
			1	3	5		
1	PKB	4339	4339	1446	868	2	BASIRIN
2	GERINDRA	2586	2586	862	517	7	ASLINDA
3	PDIP	8862	8862	2954	1772	1,6	BONAR,SARMIN
4	GOLKAR	2093	2093	697.7	419		
5	NASDEM	3739	3739	1246	748	4	YUSUF
6	GARUDA	73	73	24.33	14.6		
7	BERKARYA	135	135	45	27		
8	PKS	3931	3931	1310	786	3	LATIF
9	PERINDO	1136	1136	378.7	227		
10	PPP	1031	1031	343.7	206		
11	PSI	259	259	86.33	51.8		
12	PAN	505	505	168.3	101		
13	HANURA	9	9	3	1.8		
14	DEMOKRAT	3683	3683	1228	737	5	DIAH
15	PBB	18	18	6	3.6		
16	PKPI	10	10	3.333	2		

KECAMATAN TINGKIR

NO	NAMA PARPOL	Perolehan	PEMBAGIAN			Kursi ke	
			1	3	5		
1	PKB	2553	2553	851	511	5	MIFTAH
2	GERINDRA	3997	3997	1332	799	2	WORO
3	PDIP	10113	10113	3371	2023	1,4	DANCE,NOVI
4	GOLKAR	769	769	256.3	154		
5	NASDEM	1706	1706	568.7	341		
6	GARUDA	80	80	26.67	16		
7	BERKARYA	41	41	13.67	8.2		
8	PKS	2334	2334	778	467	6	NONO
9	PERINDO	971	971	323.7	194		
10	PPP	194	194	64.67	38.8		
11	PSI	205	205	68.33	41		
12	PAN	258	258	86	51.6		
13	HANURA	2	2	0.667	0.4		
14	DEMOKRAT	3842	3842	1281	768	3	DAYAT
15	PBB	14	14	4.667	2.8		
16	PKPI	6	6	2	1.2		

KECAMATAN ARGOMULYO

NO	NAMA PARPOL	Perolehan	PEMBAGIAN			Kursi ke	
			1	3	5		
1	PKB	2982	2982	994	596	5	SAEFUL
2	GERINDRA	2976	2976	992	595	6	SARWONO
3	PDIP	7530	7530	2510	1506	1	KEMAT
4	GOLKAR	3857	3857	1286	771	3	LISTYANTO
5	NASDEM	305	305	101.7	61		
6	GARUDA	147	147	49	29.4		
7	BERKARYA	86	86	28.67	17.2		
8	PKS	3924	3924	1308	785	2	BUDI
9	PERINDO	209	209	69.67	41.8		
10	PPP	2187	2187	729	437		
11	PSI	494	494	164.7	98.8		
12	PAN	584	584	194.7	117		
13	HANURA	7	7	2.333	1.4		
14	DEMOKRAT	3068	3068	1023	614	4	AGUS J
15	PBB	14	14	4.667	2.8		
16	PKPI	8	8	2.667	1.6		

PEROLEHAN SUARA PILPRES

NO	KECAMATAN	PASLON 01	PROSENTASE	PASLON 02	PROSENTASE
1	SIDOMUKTI	21.644	78,4 %	6.354	21,6 %
2	SIDOREJO	26.504	77,3 %	7.590	22,7 %
3	TINGKIR	22.729	77,7 %	6.086	22,3 %
4	ARGOMULYO	23.850	78,4 %	6.565	21,6 %
	JUMLAH	94.727	78,14 %	26.595	21,86 %

DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

No	Data Pemilih	Sidomukti	Sidorejo	Tingkir	Argomulyo	
1	Jml Pemilih DPT	31.101	38.622	32.109	33.317	
	Jml Pemilih DPTb	768	1233	670	429	
	Jml Pemilih DPK	468	633	761	853	
	JUMLAH	32.337	40.488	33.540	34.599	
2	Pengguna Hak Pilih					
	Dalam DPT	27.628	33.376	28.137	30.000	
	Dalam DPTb	9	15	4	20	
	Dalam DPK	468	633	761	853	
	JUMLAH	28.105	34.024	28.902	30.873	
3	Jumlah Pemilih Disabilitas					
	Terdaftar Dalam DPT,DPTb,DPK	72	84	68	43	
	Disabilitas Pengguna Hak Pilih	37	56	35	36	
4	Penggunaan Surat Suara					
	Diterima termasuk Cadangan 2% DPT	31.814	39.463	32.766	34.106	
	Dikembalikan karena rusak/keliru coblos	52	69	75	69	
	Tidak digunakan/tidak terpakai trmasuk sisa cadangan	3657	5370	3789	3164	
	Jumlah digunakan	28.105	34.024	28.902	30.873	
5	Suara Sah dan Tidak Sah					
	Suara Sah	26.965	32.410	27.582	29.534	
	Tidak Sah	1140	1614	1320	1339	
	Jumlah Suara Sah & Tidak Sah	28.105	34.024	28.902	30.873	